



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Tersangkut Kasus Penyelewengan, Desa Tetap Bisa Cairkan DD**

**KEPAHIANG** - Kendati pernah terkait kasus penyelewengan Dana Desa (DD) pada tahun sebelumnya, namun pemerintah tetap memastikan tahun ini tidak ada pemangkas DD terhadap desa-desa yang pernah bermasalah dengan hukum terkait DD sebelumnya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kepahiang, Jan Johannes Dalos, S.Sos melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kelurahan (PPDK), Zainubi, SE mengungkapkan, desa yang pernah bermasalah dengan hukum tetap bisa mencairkan DD tahun ini. Namun setelah Inspektorat Daerah (Ipda) melakukan audit terkait laporan keuangan atas penggunaan DD tahun sebelumnya.

"Hasil audit Inspektorat terhadap

laporan realisasi anggaran nantinya akan menjadi acuan kita dalam pelaksanaan pencairan DD tahun ini. Sejauh ini hasil laporan realisasi anggaran desa yang menerima DD tahun lalu, semuanya rampung 100 persen," jelas Zainubi, kemarin (30/1).

Ia juga memastikan untuk desa-desa yang sebelum mengalami kasus hukum seperti Desa Limbur Lama dan Desa Air Jernih. Kasus hukum yang dialami Kades tidak menjadi acuan Dinsos PMD dalam melakukan evaluasi, sebab dasar yang dinilai tetap LRA masing-masing desa. "Kalau kerugian negara ada TGR, mereka melakukan pengembalian," tutur Zainubi.

Di sisi lain Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM mengimbau kepada seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Kepahiang,

agar bisa kreatif dan inovatif dalam menggunakan DD. Menurutnya penggunaan DD harus diiringi dengan pengembangan ekonomi kreatif yang didasari inovasi, karenanya inovasi tidak boleh berhenti dilakukan untuk membangun desa.

"Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah harusnya benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Untuk itu desa pun harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan desa," terang Bupati.

Saat ini, sambung Bupati, desa berhak memutuskan sendiri, tidak boleh ada yang mengintervensi, baik bupati, gubernur, bahkan presiden. Karena itulah, masyarakat desa harus memiliki daya juang untuk mengembangkan potensi kekayaan desanya.

"Tidak boleh ada lagi ke depannya

kasus dimana dana desa dipakai untuk kepentingan di luar kepentingan untuk membangun desa. Persoalan SDM tak perlu jadi alasan, semuanya bisa dilakukan jika seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan desa," tegas Bupati.

Ia menambahkan penyimpangan dana desa akan berdampak sangat buruk, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat desa. Agar tidak terjadi penyimpangan, dana desa hendaknya disalurkan pada empat program kerja, yakni pembuatan embung desa, penguatan BUMDes, pengembangan produk unggulan desa, dan pembuatan sarana olahraga.

"Jika dana desa disalurkan secara benar, maka yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat desa," demikian Bupati. (sly)